

EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKARAMI KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025

Ramita Astrianai¹⁾; Erlan Dwisnu²⁾; Muhammad Solihin³⁾

Program Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ dwisnuerlian@gmail.com;

ARTICLE HISTORY

Received [20 November 2025]
Revised [25 Desember 2025]
Accepted [31 Januari 2026]

KEYWORDS

Effectiveness, Village Fund, Infrastructure, Farm Road, Community Welfare

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Fokus penelitian diarahkan pada lima aspek utama, yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) partisipasi masyarakat, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan 20 warga penerima manfaat program. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dana Desa dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Sukarami telah berjalan cukup efektif. Pembangunan infrastruktur jalan rabat beton sepanjang 1.200 meter memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi transportasi hasil pertanian, dan pengurangan biaya produksi hingga 25%. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih rendah, serta terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan kurangnya sosialisasi mengenai transparansi anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Program Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, khususnya melalui perbaikan akses jalan usaha tani, tetapi efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan akuntabilitas, dan pemeliharaan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Village Fund Program in the development of farm road infrastructure in Sukarami Village, Kaur Tengah District, Kaur Regency. The research focuses on five main aspects: (1) program planning, (2) program implementation, (3) community participation, (4) transparency and accountability, and (5) the program's impact on community welfare. This research employed a descriptive qualitative method, using in-depth interviews, field observations, and documentation for data collection. The informants consisted of the Village Head, the Head of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and 20 villagers who benefited directly from the program. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (1994) through three main stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results showed that the implementation of the Village Fund Program for farm road construction in Sukarami Village was quite effective. The construction of a 1,200-meter concrete farm road significantly improved accessibility, reduced transportation time and costs

by up to 25%, and enhanced agricultural productivity. However, community participation in planning and supervision remains limited, and several obstacles were identified, such as delayed fund disbursement, limited administrative capacity, and insufficient transparency and public dissemination of information. In conclusion, the Village Fund Program has made a significant contribution to improving farmers' welfare, particularly by enhancing agricultural access roads. Nonetheless, its overall effectiveness can be further improved through increased community involvement, stronger accountability mechanisms, and sustainable infrastructure maintenance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Program Dana Desa merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelatihan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, efektivitas program ini sering kali mencerminkan hambatan seperti transparansi pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan.

Pada tingkat nasional, alokasi Dana Desa mencapai Rp 68 triliun pada tahun 2023, dengan fokus pada prioritas seperti infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). Namun evaluasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan desa sebesar 1-2% per tahun, tantangan seperti korupsi dan ketidakmerataan tersebar masih tinggi, dengan indeks efektivitas rata-rata 65% di Provinsi Bengkulu (BPS, 2022). Di Kabupaten Kaur, tren ini tercermin dalam laporan pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dari 40% pada tahun 2020 menjadi 55% pada tahun 2023, namun masih di bawah target nasional 70%.

Program Landasan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan desa didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Di Kabupaten Kaur, alokasi Dana Desa mengalami tren penurunan dari sekitar Rp 140 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 138,5 miliar pada tahun 2025, meskipun jumlah desa tetap 192 unit.

Melalui Dana Desa, pemerintah Desa Sukarami berupaya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi hasil pertanian dengan membangun dan memperbaiki jalan usaha tani. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengawasan dan pelaporan. Selain itu, masih muncul pertanyaan sejauh mana pembangunan jalan usaha tani benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum.

Efektivitas program dapat diukur melalui pendekatan seperti menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan diperoleh data lapangan yang dikelompokkan ke dalam lima fokus utama, yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) partisipasi masyarakat, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Dana Desa, efektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori pembangunan partisipatif dari Chambers (1997), yang menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal. Teori ini relevan karena program Dana Desa sering gagal jika tidak melibatkan partisipasi aktif, seperti yang terjadi di banyak desa di Indonesia (lihat penelitian Widjaja & Sudrajat, 2020).

Kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan. Penelitian Sari (2018) menemukan bahwa keberhasilan program bergantung pada kemampuan aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan. Teori desa pembangunan dari Kartasasmita (1996) menggambarkan sebagai usaha sadar untuk mencapai perubahan dari kondisi buruk ke lebih baik, sementara Nurcholis (2011) menekankan pembangunan sebagai perubahan yang menciptakan keadaan masyarakat yang lebih baik secara holistik. Namun di Desa Sukarami, partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga program belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas Program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Desa Sukarami, dengan meninjau proses perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas program dapat diukur melalui data lapangan yang dikelompokkan ke dalam lima fokus utama menurut Miles dan Huberman (1994) yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) partisipasi masyarakat, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat:

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris "effectifines" yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan). Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:4), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menurut Kurniawan (2005:109). Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada atau suatu organisasi sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau diantara ketegangan pelaksanaannya.

Efektivitas program dapat diukur pendekatan seperti model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan untuk memperoleh data lapangan yang dikelompokkan ke dalam lima fokus utama, yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) partisipasi masyarakat, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa Dana Desa adalah instrumen penting untuk mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Menurut (HAW. Wijajah, 2012), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2021), Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:8) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (Gabungan). Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.. Dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data (B. Bungin, 2007)

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) → untuk menggali persepsi dan pengalaman aparatur desa dan masyarakat terkait implementasi Dana Desa.
2. Observasi Lapangan → untuk memperoleh gambaran nyata tentang infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Dokumentasi → berupa dokumen perencanaan, laporan realisasi, foto kegiatan, serta data demografi dan potensi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sukarami terletak di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini memiliki karakteristik agraris dengan luas lahan pertanian sekitar 112 hektare dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani karet, sawit, dan padi. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk Desa Sukarami mencapai 725 jiwa. Struktur pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dana Desa yang diterima oleh Desa Sukarami pada tahun anggaran 2024–2025 sebesar Rp 952.382.000, di mana sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan usaha tani yang menghubungkan lahan pertanian dengan jalan utama desa.

Letak Geografis Desa

Letak geografis desa sukarami yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan desa Pengawi, sebelah utara berbatasan dengan desa Pajar Bulan, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Suka Banjar.

Berdasarkan hasil penelitian, potensi penggunaan dana desa Penelitian ini dilakukan di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Desa ini memiliki jumlah penduduk 725 jiwa dengan luas wilayah ±300 hektar yang terbagi dalam beberapa dusun. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani karet, sawit, dan padi, sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pedagang, buruh, dan pegawai honorer. Sebagai penerima Dana Desa sejak tahun 2015, Sukarami termasuk desa yang cukup aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Dari hasil penelitian Terdapat Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.200 meter menuju area persawahan. Total Dana Desa yang diterima pada tahun 2025 sebesar Rp 952.382.000, dengan diperuntukkan dana desa sebesar Rp. 662.483.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp. 290.382.000. Pembagian APBDesa dapat dilihat dari pada gambar 1



Gambar 4.1
Grafik APBDes

Gambar. 1 Grafik APBDes

Program Dana Desa di Desa Sukarami efektif dalam aspek infrastruktur yang langsung meningkatkan kesejahteraan fisik dan ekonomi sebagian warga misalnya, akses yang lebih baik. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena partisipasi pasif, transparansi yang kurang, dan kendala teknis seperti keterlambatan dana, yang membuat dampak tidak merata dan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan standar nasional (seperti laporan Kemendes PDTT), desa ini berada di level sedang—lebih baik daripada desa tanpa program, tapi perlu perbaikan untuk mencapai kesejahteraan inklusif.

Penelitian dilakukan terhadap sejumlah informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, yaitu: Kepala Desa Sukarami, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan 20 warga penerima manfaat program. Dari hasil penelitian menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan diperoleh data lapangan yang dikelompokkan ke dalam lima fokus utama, yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan program, (3) partisipasi masyarakat, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

a) Perencanaan Program

Perencanaan pembangunan jalan usaha tani dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukarami:

"Kami melakukan musyawarah bersama petani untuk menentukan lokasi jalan usaha tani yang paling mendesak dibangun. Hasilnya disepakati untuk membuka akses ke lahan sawah di Dusun II." (Armansyah, Kepala Desa, 27/09/2025)

Meskipun musyawarah dilaksanakan sesuai ketentuan, partisipasi masyarakat umum masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan berjalan efektif secara administratif, tetapi belum sepenuhnya partisipatif.

b) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan sistem swakelola dan padat karya. Pekerjaan fisik yaitu Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.200 meter menuju area persawahan,

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai RKPDes, namun terkendala oleh keterlambatan pencairan dana tahap II serta cuaca yang kurang mendukung. Meskipun demikian, sebagian besar pekerjaan telah selesai dengan kualitas baik dan langsung dimanfaatkan petani.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani cukup tinggi dalam aspek pelaksanaan fisik, di mana warga turut bekerja sebagai tenaga padat karya. Namun, dalam tahap perencanaan dan evaluasi, keterlibatan masyarakat masih pasif.

"Kami ikut kerja di lapangan saat pembuatan jalan, tapi soal rencana dan pelaporan, biasanya sudah diurus oleh perangkat desa." (Kenzi, warga Desa Sukarami, 27/09/2025)

Partisipasi instrumental seperti ini menunjukkan adanya rasa gotong royong, tetapi belum mencerminkan partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah desa telah memasang papan informasi proyek dan baliho APBDes di tempat umum sebagai bentuk transparansi. Namun, sebagian masyarakat belum memahami rincian anggaran dan mekanisme pelaporan. Ketua BPD menyatakan:

"Kami mengawasi jalannya pembangunan, tapi memang perlu sosialisasi lebih sering agar warga tahu bagaimana dana digunakan." (Devi Mawarti, Ketua BPD, 27/09/2025)

Secara administratif akuntabilitas berjalan baik, tetapi secara sosial perlu peningkatan komunikasi dan penyederhanaan informasi bagi masyarakat.

d) Dampak Pembangunan terhadap Kesejahteraan Petani

Pembangunan jalan usaha tani berdampak langsung terhadap efisiensi transportasi hasil pertanian. Waktu tempuh petani ke lahan dan ke pasar berkurang 30–40%, biaya angkut turun 25%, dan akses mobilitas meningkat, terutama pada musim hujan.

“Sekarang lebih mudah ke sawah dan bawa hasil panen ke jalan besar. Dulu kalau hujan susah lewat, sekarang lancar.” (Timah, petani Desa Sukarami, 27/11/2025)

Selain dampak ekonomi, terdapat pula dampak sosial berupa meningkatnya interaksi antarwarga dan perluasan aktivitas ekonomi di sekitar jalur baru tersebut. Dengan demikian, pembangunan jalan usaha tani dinilai efektif secara fungsional, meskipun aspek pemberdayaan dan perawatan pasca-pembangunan perlu diperkuat.

e) Kendala Pelaksanaan

Beberapa kendala utama yang ditemukan:

- 1) Keterlambatan pencairan Dana Desa, menyebabkan mundurnya jadwal pekerjaan.
- 2) Kapasitas teknis aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan masih terbatas.
- 3) Minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan dana publik.
- 4) Kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang memperlambat pekerjaan lapangan.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada besarnya dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan partisipasi sosial masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Dana Desa di Desa Sukarami sudah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur jalan usaha tani. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan pemberdayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan desa ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Desa Sukarami, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Dana Desa

Secara umum, program pembangunan jalan usaha tani melalui Dana Desa di Desa Sukarami berjalan cukup efektif. Program ini berhasil meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilisasi hasil pertanian, serta menurunkan biaya transportasi dan waktu tempuh menuju lahan pertanian. Infrastruktur yang dibangun juga mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, meskipun dampaknya belum merata di seluruh wilayah desa.

2. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang sesuai dengan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Namun, partisipasi masyarakat umum masih terbatas pada tokoh-tokoh tertentu. Pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berjalan baik secara administratif, meskipun terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana dan kondisi cuaca yang memperlambat pekerjaan lapangan. Secara umum, pelaksanaan proyek telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan fisik (melalui sistem padat karya), tetapi masih rendah pada tahap perencanaan dan evaluasi. Warga cenderung berperan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan partisipasi yang bersifat instrumental, bukan substantif, sehingga perlu upaya pemberdayaan agar masyarakat lebih aktif dalam proses pembangunan desa.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui pemasangan papan informasi proyek dan baliho APBDes. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap rincian anggaran dan alur penggunaan dana masih rendah. Akuntabilitas administrasi berjalan baik, tetapi akuntabilitas publik memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal sosialisasi dan pelaporan hasil pembangunan yang mudah dipahami masyarakat.

Dampak terhadap Kesejahteraan Petani

Dampak positif pembangunan jalan usaha tani terlihat pada peningkatan efisiensi usaha tani, menurunnya biaya angkut hasil panen, dan meningkatnya frekuensi aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan ini turut memperkuat interaksi sosial dan memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian lokal. Meskipun demikian, masih diperlukan perhatian terhadap aspek perawatan jalan dan pemerataan manfaat bagi seluruh kelompok petani di desa.

Kendala Pelaksanaan

Faktor-faktor yang menjadi kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana, terbatasnya kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi geografis. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola, koordinasi antar lembaga desa, dan dukungan masyarakat.

Secara keseluruhan, Program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Desa Sukarami telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui partisipasi yang lebih inklusif, transparansi yang lebih terbuka, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat tani.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah Desa Sukarami

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Desa dengan cara memperluas undangan kepada kelompok tani, perempuan, dan pemuda, agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama.

Memperkuat kapasitas aparatur desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui pelatihan teknis tentang manajemen proyek, pelaporan keuangan, dan pengawasan infrastruktur.

Mengembangkan mekanisme transparansi publik yang interaktif, misalnya dengan forum pertanggungjawaban tahunan terbuka atau publikasi daring mengenai realisasi Dana Desa.

Menyusun program pemeliharaan rutin jalan usaha tani dengan melibatkan masyarakat pengguna agar infrastruktur yang dibangun dapat berkelanjutan.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur

Menyederhanakan prosedur pencairan Dana Desa agar lebih tepat waktu, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terhambat oleh faktor administrasi.

Memperkuat fungsi pendamping desa agar lebih aktif memberikan supervisi dan pelatihan teknis terkait perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian.

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu berbasis digital yang dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi lintas desa.

c) Bagi Masyarakat Desa Sukarami

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, bukan hanya pada pelaksanaan fisik, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan.

Menumbuhkan inisiatif kelompok swadaya masyarakat atau kelompok tani untuk menjaga dan memanfaatkan jalan usaha tani secara berkelanjutan.

Mendorong kegiatan ekonomi produktif berbasis hasil pertanian yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan usaha tani, seperti koperasi tani dan pengolahan hasil panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah dan Budiyo, Haris. (2019). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- B, Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Kurniawan, A. (2005). *Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas*.
- Lisabela, M. (2020). *Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman*. Universitas Bina Darma Palembang.
- Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 363-393.

- Nurcholis, H. (2011). Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah. Jurnal Studi Pemerintahan.
- Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja'Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(6), 3674.
- Sari, A. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan, Mojokerto) (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Sugiyono, P. D. (2006:8). Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D
- Wibisana, I., & Sudrajat, A. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pemerintahan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Barat. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 20-35.